



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



RENJA 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rancangan Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja), digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan anggaran untuk mendanai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, sebagai wujud untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat. Terkait hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat perlu merancang pelaksanaan tugas-tugasnya agar lebih jelas dan terukur.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai wujud penjabaran / pelaksanaan dari RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2025 – 2030 yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan digunakan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya program kerja yang selaras, maka diharapkan ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi pengembangan rencana kerja dari seluruh komponen penyelenggara fungsi perencanaan perangkat daerah. Sehingga nantinya dapat diterima sebagai pedoman untuk penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

Manokwari,

2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat

DEASSY D. TETELEPTA, ST

Pembina (IV/a)

NIP. 197312092003122005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..	3
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	3
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.3.1 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Papua Barat	16
2.3.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Papua Barat	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulam Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	62
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	64
3.3 Program dan Kegiatan.....	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	77
BAB V PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Provinsi Papua Barat -----	6
Tabel 2.2	T-C 33 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Provinsi Papua Barat -----	13
Tabel 2.3	T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -----	52
Tabel 3.1	Matriks Keterkaitan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional 2026 -----	63
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026 ----	64
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Indikatif Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026 -----	66
Tabel 3.4	T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahjun 2027 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Baftrat -----	72
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026 -----	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Laksana Bappeda Provinsi Papua Barat-----36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan mempertimbangkan segala potensi, permasalahan, dan hambatan yang mungkin timbul, perencanaan pembangunan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah menegaskan peran strategis perencanaan ini dengan mewajibkan setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang menyeluruh, terpadu, terarah, sistematis, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana tersebut harus memiliki tiga jenjang perencanaan, yaitu tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pertimbangan strategis bahwa Renja BAPPEDA harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026. Hal ini dimaksudkan agar setiap rencana tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang daerah dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen jangka panjang atau jangka menengah serta memperhatikan identifikasi kebutuhan. RPJPD yang memuat tujuan, misi, dan visi pembangunan daerah jangka panjang harus selaras dengan Renja BAPPEDA. Untuk menjawab berbagai kesulitan dan tantangan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus pada tahun 2026, RPJPD memberikan kerangka dasar yang mengarahkan penyusunan rencana tahunan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan kajian analisis kebutuhan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah secara sistematis menjabarkan kondisi ideal yang ingin dicapai beserta uraian cara pencapaiannya. Dengan demikian, informasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana mengukur sasaran pencapaian kinerja pada setiap jenjang pertumbuhan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Papua Barat tahun 2026, tolok ukur dan kendala yang harus dihadapi adalah konsistensi dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Papua Barat.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah salah satu dokumen yang resmi dan penting dalam dokumen perencanaan yang memuat Rencana Pembangunan Tahunan dari sebuah Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan daerah yang juga sangat penting adalah RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dengan periode 20 tahun, RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dengan periode 3 Tahun, Renstra Perangkat Daerah (Rencana Strategis Perangkat Daerah) dengan periode 5 Tahun dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan periode 1 tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Renja BAPPEDA Provinsi Papua Barat) tahun 2026 disusun pada tahun 2025 dan merupakan Periode Renstra BAPPEDA 2023-2026.

Dokumen Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional. Selanjutnya Renja BAPPEDA Provinsi Papua Barat ini akan direalisasikan masing-masing dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2024 didasarkan atas :

- 1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat;

- 2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratran Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang.
- 5) UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 11) Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2012-2025;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Papua barat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2026 adalah untuk menyusun/menetapkan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju yang dapat dijadikan acuan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat

- Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan suatu perencanaan, erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi, dapat teridentifikasi sejauh mana proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang menghambat perencanaan pembangunan di setiap OPD. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan selanjutnya pada tahun-tahun mendatang.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua Barat dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran dan dari hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun berikutnya (Tahun n+1).

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan ketiga komponen dari IPM tersebut.

Kondisi daerah Provinsi Papua Barat terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Ketersediaan Dokumen Perencanaan**

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari; Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pada tahun anggaran 2026, Kegiatan yang akan dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Papua Barat antara lain:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 masih dalam proses penyusunan dan penetapan,
- b. Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2026 masih dalam proses penyusunan dan penetapan,
- c. Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA dilaksanakan setelah tahun anggaran selesai dilaksanakan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2026.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung dalam hal ini Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan & Tambahan Penghasilan PNS) tahun 2024 adalah Rp. 12.048.296.588,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.650.905.145,- atau 80,10%. Belanja pegawai meliputi :

- Belanja Gaji dan Tunjangan
- Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK.

B. Belanja Langsung

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (Empat) Sub kegiatan yang merupakan kegiatan rutin dengan alokasi dana sebesar Rp. **369.903.060,-** dan realisasi sebesar Rp. **368.536.260,-** atau 99,63 %. Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini telah terealisasi baik dari segi keuangan maupun kinerja.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub kegiatan dengan alokasi pagu Rp. 591.873.678,- dan terealisasi sebesar Rp. 583.355.537,- atau 98,56%. Kegiatan ini telah dilaksanakan semua, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan rutinitas BAPPEDA Provinsi Papua Barat dalam rangka peningkatan Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Papua Barat Secara Menyeluruh.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 5 (Lima) Sub kegiatan dengan pagu Rp. **348.553.378,-** dan terealisasi sebesar Rp. **348.131.878,-** atau 99,88%. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 7 (Tujuh) Sub kegiatan dengan pagu Rp. 1.832.803.046,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.831.570.961,- atau 99,93% . Pada Kegiatan ini Bertujuan Untuk Menyediakan Kebutuhan Rutin Yang Bersifat Umum Pada Perangkat Daerah.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (Satu) Sub kegiatan dengan penganggaran sebesar **Rp. 33.732.496,-** dan realisasi sebesar **Rp. 33.728.500,-** atau 99,99%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kegiatan ini untuk menunjang urusan Rumah Tangga Perangkat Daerah.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 3.768.909.431,- dan realisasi sebesar Rp. 3.601.028.504,- atau 95,55%. Kegiatan ini antara Menyediakan Jasa Penunjang Urusan Rutin Perangkat Daerah.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (Empat) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 344.799.978,-** dan realisasi sebesar **Rp 342.519.978,-** atau tingkat capaian kinerja program sebesar 99,34%.

8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (Empat) Sub Kegiatan, dengan total penganggaran sebesar Rp. 3.752.146.339,- dan realisasi sebesar Rp. 3.740.076.852,- atau 99,68%. Dalam Kegiatan Ini Terdapat Sub Kegiatan Terkait Dengan Perencanaan Otonomi Khusus Papua Barat.

A. Dokumen Usulan Kabupaten Kota dan Provinsi terkait Otsus

9. Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (Dua) kegiatan, dengan total penganggaran sebesar Rp. 1.445.325.338,- dan realisasi sebesar Rp. 1.441.211.620,- atau rata-rata tingkat capaian kinerja program 99,72%.

A. Database SAIK Plus dan Dokumen RAP Otsus

10. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub kegiatan, dengan total penganggaran sebesar Rp. 3.648.634.281,- dan realisasi sebesar Rp. 3.578.694.316,- atau rata-rata tingkat capaian kinerja program 98,08%.

A. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus

11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Pada Kegiatan ini terdapat 8 (Delapan) Sub kegiatan, dengan total penganggaran sebesar **Rp. 2.499.999.764,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.495.207.647,-** atau rata-rata tingkat capaian kinerja program 99,81%.

12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Dan SDA

Pada Kegiatan ini terdapat 8 (Enam) Sub kegiatan, Dengan penganggaran sebesar Rp. 2.313.581.666,- dan realisasi sebesar Rp. 2.211.709.536,- atau rata-rata tingkat capaian kinerja program 95,60%.

13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

Pada kegiatan ini terdapat 6 (Enam) Sub kegiatan, Dengan penganggaran sebesar **Rp. 2.498.717.122,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.491.899.943,-** atau rata-rata tingkat capaian kinerja program 99,73%.

Tabel 2.1/ T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)
Provinsi Papua Barat

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6		7		8=(7/6)		9	10=(6+9)	11=(10/4)	
PERENCANANA				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.732.045.200,50	100%	100%	19.338.871.655	100%	16.759.776.763	100,00%	86,66%	100%	20.526.434.212,00	39.865.305.867	60,20%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.686.901,00	100%	100%	369.903.060	100%	368.536.260	100,00%	99,63%	100%	185.659.475,00	555.562.535	89,58%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan	16.766.639.085,60	100%	100%	12.640.170.266	100,00%	10.234.260.682	100,00%	80,97%	100%	14.193.244.983,00	26.833.415.249	62,48%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian	706.119.213,00	100%	100%	348.553.378	100,00%	348.131.878	100,00%	99,88%	100%	575.563.118,60	924.116.497	76,41%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.405.600.000,00	100%	100%	1.832.803.046	100,00%	1.831.570.961	100,00%	99,93%	100%	1,637,700634,70	34.70.503.681	40,50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	461.500.000,00	100%	100%	33.732.496	100,00%	33.728.500	100,00%	99,99%	100%	9,120,000,00	42.852.496	9,29%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.294.500.000,01	100%	100%	3.768.909.431	100,00%	3.601.028.504	100,00%	95,56%	100%	2,787,974,742,00	65.568.84.173	19,74%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000,89	100%	100%	344.799.978	100,00%	342.519.978	100,00%	99,34%	100%	797,447,298,00	1.142.247.276	52,53%
ROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	3.724.000.000,00	100%	100%	8.846.105.958	100,00%	8.759.982.788	100,00%	99,03%	100%	4,746,890,248,00	13.592.996.206	27,40%

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD												
	Cakupan Evaluasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Otonomi Khusus												
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase Tercapaian Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.205.000.000,00	100%	100%	3.752.146.339	100.00%	3.740.076.852	100.00%	99,68%	100%	2,788,624,372.00	6.540.770.711	33,71%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Tercapaiannya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	644.000.000,00	100%	100%	1.445.325.338	100.00%	1.441.211.620	100.00%	99,72%	100%	686,232,292.00	2131557630	30,21%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Tercapaiannya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	875.000.000,00	100%	100%	3648634281	100.00%	3578694316	100.00%	98,08%	100%	1,272,033,584.00	4920667865	17,8%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Keselarasan RKPDP Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	5.510.000.000	100%	100%	7312298552	100.00%	7198817126	100.00%	98,45%	100%	3,908,338,889.00	11220637441	49,11%
	Presentase Keselarasan RKPDP Dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian Dengan SDA												
	Presentase Keselarasan RKPDP Dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah												
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1.980.000.000,0	100%	100%	2499999764	100.00%	2495207647	100.00%	99,81%	100%	1,341,910,385.00	3841910149	51,54%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sumber Daya Alam Dan Perekonomian	1.790.000.000,0	100%	100%	2313581666	100.00%	2211709536	100.00%	95,60%	100%	1,499,340,000.00	3812921666	46,95%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	1.740.000.000,00	100%	100%	2498717122	100.00%	2491899943	100.00%	99,73%	100%	1,067,088,504.00	3565805626	48,80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergi antara Perencanaan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupatennya. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintahan Daerah telah dibuat seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas BAPPEDA Provinsi Papua Barat selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, yaitu dengan teknik antara lain:

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Antara Pusat dan Daerah.
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
			Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn - n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
2		Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
3		Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
4		Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
5		Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada		
6		Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada		
8	Cakupan Realisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Kebijakan Otonomi Khusus	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
9		Persentase Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
10		Persentase Tercapainya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
11		Persentase Tercapainya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
12		Persentase Tercapainya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
13	Cakupan Koordinasi Dan Sinkronisasi	Persentase Tercapainya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		

14	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tercapainya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
15		Persentase Tercapainya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
16		Persentase Tercapainya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Papua Barat jika diukur dari segi kuantitas program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan terutama dengan memanfaatkan forum koordinasi secara optimal untuk merumuskan perencanaan program dan kegiatan guna menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena beberapa tahapan dalam proses perencanaan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Persoalan dan tantangan yang muncul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mengingat beban kerja Bappeda Provinsi Papua Barat cukup berat, maka sumber daya manusia yang dimiliki saat ini belum optimal. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai seefisien mungkin, Bappeda Provinsi Papua Barat juga melakukan pembagian penggunaan sumber daya. Akibatnya, hal ini berdampak pada kemampuan masing-masing bidang kerja dalam mencapai kinerja dan penyerapan anggaran;
2. Pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Papua Barat yang dilakukan secara bersamaan dengan komposisi sumber daya manusia yang sama. Hal ini didasarkan pada alasan pada poin (1) yang menyatakan bahwa terdapat permasalahan pada ketersediaan sumber daya manusia.

Bappeda Provinsi Papua Barat harus menyusun perencanaan terpadu dan bersinergi dengan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota melalui forum-forum diskusi yang efisien untuk menyepakati kegiatan-kegiatan perencanaan yang selaras dengan tugas pokok organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan perencanaan.

Sinergi antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral sangat diperlukan dalam upaya strategis untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan tersebut. Hal ini melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Papua Barat. Tidak dapat dipisahkan peran semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik DPRD, perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat, dan lain-lain.

Untuk memastikan keberhasilan pembangunan di Papua Barat, Bappeda Provinsi Papua Barat harus meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan dengan rencana pembangunan. Selain itu, Bappeda Provinsi Papua Barat dapat menyelaraskan rencana pembangunan di tingkat provinsi, nasional dan kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat ke depannya agar dapat memadukan program dan kegiatan dari setiap bidang perencanaan di Bappeda Provinsi Papua Barat.

2.3.1 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Papua Barat

Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah, dan fungsi diantaranya:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Barat termasuk dalam perangkat daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Secara rinci, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah.

Uraian rinci mengenai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
- 3) Pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- 5) Pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;

- 6) Pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
- 7) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan,
- 8) Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya terdiri dari Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Rincian mengenai tugas pada masing-masing bagian di Sekretariat adalah sebagai berikut:

B.1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Subbagian;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
- 4) Melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
- 5) Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan unit-unit kerja lingkup Badan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- 8) Melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (lkpj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (lkpj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
- 9) Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Subbagian;
- 2) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;

- 3) Menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- 5) Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
- 6) Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
- 7) Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 8) Menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- 9) Membuat register SPP, SPM dan SPJ;
- 10) Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
- 11) Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- 12) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

B.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Subbagian;
- 2) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
- 3) Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
- 4) Menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- 6) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan:
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 9) Menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
- 10) Menyusun jadwal dan mengelola rapat Badan, kunjungan tamu Badan, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
- 12) Mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;

- 15) Menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan analisis data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan analisis data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
6. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
7. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
8. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya terdiri dari Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah; Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas; dan Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Rincian mengenai tugas pada masing-masing sub bidang di Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

C.1. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah

Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisis ekonomi makro daerah;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisis ekonomi makro daerah;

4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan analisis ekonomi makro daerah;
5. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
6. Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
7. Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
8. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan pagu indikatif pembangunan daerah;
9. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan KUA dan PPA;
10. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan analisis ekonomi makro daerah;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

C.2. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas

Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisis kewilayahan dan konektivitas;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisis kewilayahan dan konektivitas;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan analisis kewilayahan dan konektivitas;
5. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
6. Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
7. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah sesuai dengan RTRW daerah;
8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan analisis kewilayahan dan konektivitas;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

C.3. Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan data, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan data, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan data, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;
7. Melaksanakan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
8. Melaksanakan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
9. Melaksanakan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
11. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
12. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
13. Melaksanakan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah
14. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
15. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan data, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

D. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda olahraga, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat. Bidang Pembangunan Manusia

dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya terdiri dari Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat; Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Sub Bidang Sosial, Kebudayaan, Pemerintahan dan Ketertarikan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat. Rincian mengenai tugas pada masing-masing sub bidang di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

D.1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;

8. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
11. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
12. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

D.2.Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
4. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
5. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
6. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
7. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
8. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
10. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;

11. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
12. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

D.3.Sub Bidang Sosial, Kebudayaan, Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

Sub Bidang Sosial, Kebudayaan, Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
8. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
11. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;

12. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial, kebudayaan, pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

E. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sesuai lingkup tugasnya;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sesuai lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya terdiri dari Sub Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; dan Sub Bidang Pariwisata, Energi Sumber Daya Mineral dan Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Alam. Rincian mengenai tugas pada masing-masing sub bidang di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

E.1. Sub Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Sub Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;

4. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
5. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
6. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
7. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
8. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
10. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
11. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
12. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

E.2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal

Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;

5. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
8. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
11. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
12. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

E.3. Sub Bidang Pariwisata, Energi Sumber Daya Mineral dan Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Alam

Sub Bidang Pariwisata, Energi Sumber Daya Mineral dan Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;

7. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
8. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
11. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
12. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, energi sumber daya mineral dan pengembangan ekonomi sumber daya alam;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

F. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai lingkup tugasnya;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya terdiri dari Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang; Sub Bidang Infrastruktur Komunikasi, Informasi dan Perhubungan; dan Sub Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan. Rincian mengenai tugas pada masing-masing sub bidang di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:

F.1. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang

Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
8. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
11. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
12. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan penataan ruang;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

F.2. Sub Bidang Infrastruktur Komunikasi, Informasi dan Perhubungan

Sub Bidang Infrastruktur Komunikasi, Informasi dan Perhubungan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
8. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
11. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
12. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur komunikasi, informasi dan perhubungan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

F.3. Sub Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan

Sub Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;

3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
8. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. Melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
11. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
12. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan kawasan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

G. Bidang Perencanaan Otonomi Khusus

Bidang Perencanaan Otonomi Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus. Bidang Perencanaan Otonomi Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus;
4. pelaksanaan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus;

5. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Otonomi Khusus sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya terdiri dari Sub Bidang Pendataan; Sub Bidang Perencanaan dan Program; dan Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Rincian mengenai tugas pada masing-masing sub bidang di Bidang Perencanaan Otonomi Khusus adalah sebagai berikut:

G.1.Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus;
4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan standar operasional prosedur berkenaan dengan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus;
5. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, perangkat daerah terkait lainnya dan unit kerja lingkup Badan berkenaan dengan pelaksanaan pendataan aspek-aspek akselerasi/percepatan pembangunan lingkup otonomi khusus;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, perangkat daerah terkait lainnya, dan unit kerja lingkup Badan berkenaan dengan pengelolaan data pembangunan lingkup otonomi khusus;
7. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait berkenaan dengan penyediaan dan pemilahan data pembangunan lingkup otonomi khusus;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus.

G.2.Sub Bidang Perencanaan dan Program

Sub Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan dan penyusunan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan dan penyusunan program pembangunan lingkup otonomi khusus;

4. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan standar operasional prosedur berkenaan dengan perencanaan dan penyusunan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan, Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan perangkat daerah terkait lainnya dalam penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD berkenaan dengan perencanaan dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan, Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan perangkat daerah terkait lainnya dalam penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD berkenaan dengan perencanaan dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan, Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan perangkat daerah terkait lainnya dalam penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan dengan perencanaan dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan, Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan perangkat daerah terkait lainnya dalam rangka harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan pembangunan lingkup otonomi khusus yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi;
9. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan perencanaan dan penyusunan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
10. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan dan penyusunan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus.

G.3.Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
2. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
4. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan standar operasional prosedur berkenaan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
5. melaksanakan penyiapan bahan serta koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan, Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan perangkat daerah terkait lainnya dalam rangka monitoring pelaksanaan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;

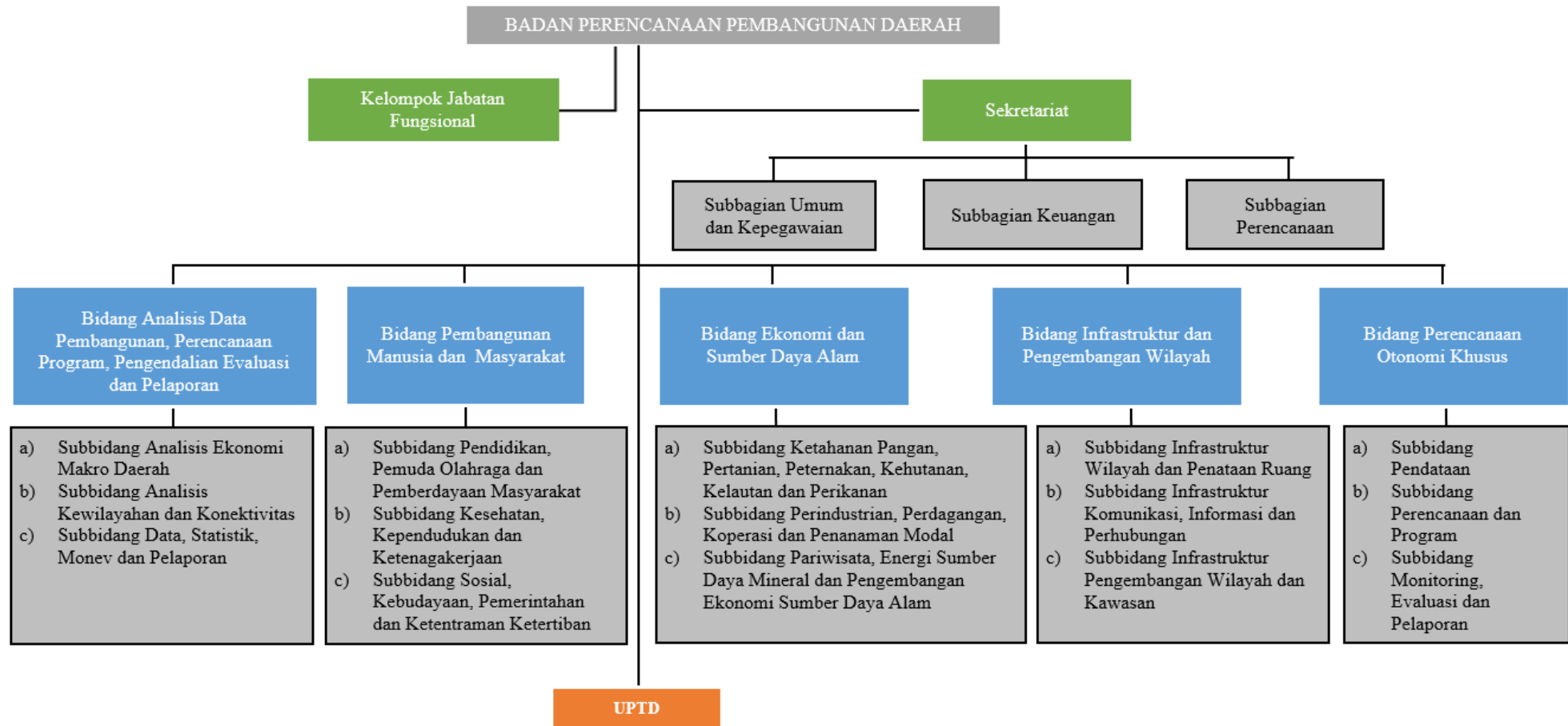
6. melaksanakan penyiapan bahan serta koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan, Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan perangkat daerah terkait lainnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
7. melaksanakan penyiapan bahan serta koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan dan Sekretariat Daerah cq Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam rangka penyusunan laporan berkenaan dengan pelaksanaan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
8. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan lingkup otonomi khusus;
10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus.

H. Unit Pelaksana Teknis

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Laksana Bappeda Provinsi Papua Barat

2.3.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Papua Barat

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA, sehingga belum meratanya pembagian beban kerja.
- b. Perubahan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat akansangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi masing-masing bagian/bidang.
- d. Adanya keterlambatan regulasi sehingga dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran.
- e. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal atau mundur dari jadwal, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran yang lambat.
- f. Belum optimalnya ketersediaan data dari setiap OPD untuk menunjang poses perencanaan yang baik dan menjawab kebutuhan masyarakat/daerah.
- g. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Bappeda menggunakan alat bantu berupa aplikasi perencanaan berbasis web. Alur proses dimulai dengan mengentri rancangan awal Renja di aplikasi perencanaan SIPD-RI yang selanjutnya akan secara otomatis tersalin ke dalam rancangan awal RKPD, begitu pula dengan tahapan rancangan akhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara RKPD dan Renja. Secara lengkap dan rinci, review terhadap rancangan awal RKPD Bappeda Papua Barat disajikan pada Tabel 2.2/TC.31

Tabel 2.2 / T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Provinsi Papua Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp....)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp...)						
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)				
5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	21.309.438.851,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	21.732.045.200,50	
5	1	1	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manokwari	Peresentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	185.659.475,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manokwari	Peresentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	497.686.901,00	
5	1	1	1.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	80.681.240,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	161,848068,00	
5	1	1	1.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	75,318,193,00	
5	1	1	1.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	66,642,867,00	
5	1	1	1.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	22.383.235,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	95,097,600,00	
5	1	1	1.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	26,000,000,00	

5	1	1	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Manokwari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	45.620.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Manokwari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	9,034,543,000	
5	1	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manokwari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	36.975.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manokwari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	63,745,630,000	
5	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.928.943.591,90	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16,766,639,085,00	
5	1	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Manokwari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	13.460.571.116,90	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Manokwari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	15,662,779,792,40	
5	1	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Manokwari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	289.260.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Manokwari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	225,004,000,00	
5	1	1	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	65.473.075,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	161,276,363,30	
5	1	1	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	52.104.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Manokwari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	211.578.929,90	
5	1	1	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Manokwari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	46.423.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Manokwari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	185.000.000,00	
5	1	1	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Manokwari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Manokwari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	45.000.000,00	
5	1	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Manokwari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	15.112.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Manokwari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	250.000.000,00	

5	1	1	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Manokwari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Manokwari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	26.000.000.00	
5	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	624.805.118,60	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	706.119.213.00	
5	1	1	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Manokwari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	7.996.670,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Manokwari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	53.000.000.00	
5	1	1	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Manokwari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15 STELL	193.776.004,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Manokwari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15 STELL	45.500.000	
5	1	1	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Manokwari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	143.216.250,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Manokwari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	104.520.000.00	
5	1	1	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Manokwari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	106.201.750,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Manokwari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	127.599.213.00	
5	1	1	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Manokwari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	88.868.294,60	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Manokwari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	225.000.000.00	
5	1	1	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Manokwari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Manokwari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	58.500.000.00	
5	1	1	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Manokwari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	84.746.150,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Manokwari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	92.000.000.00	
5	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Manokwari	Presentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.153.924.844,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Manokwari	Presentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.405.600.000,00	
5	1	1	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Manokwari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.965.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Manokwari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.100.000.00	

5	1	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Manokwari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	340.095.298,10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Manokwari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.500.000.00	
5	1	1	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Manokwari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	111.855.089,80	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Manokwari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	89.5000.000.00	
5	1	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Manokwari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.905.758,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Manokwari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.000.000.00	
5	1	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Manokwari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	67.922.500,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Manokwari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	106.000.000.00	
5	1	1	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Manokwari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Manokwari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19.500.000.00	
5	1	1	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Manokwari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	674.150.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Manokwari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	245.000.000.00	
5	1	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Manokwari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	548.720.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Manokwari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	700.000.000,00	
5	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.120.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	461.500.000.00	
5	1	1	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Manokwari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Manokwari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	318.500.000.00	
5	1	1	1.07	0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Manokwari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9.120.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Manokwari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	143.000.000.00	
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.609.538.524,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.294.500.000,01	
5	1	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	19.500.000.00	
5	1	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	250.000.000.00	

					Sumber Daya Air dan Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
5	1	1	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00
5	1	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000,00
5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	797.447.298,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	600.000.000,89
5	1	1	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Manokwari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	295.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Manokwari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	195.000.000,00
5	1	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Manokwari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	45.900.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Manokwari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000,00
5	1	1	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Manokwari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	42.402.248,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Manokwari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000,89
5	1	1	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Manokwari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	413.945.050,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Manokwari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	325.000.000,00
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Manokwari	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ketersediaan Dokumen RKPD	100%	5.080.888.648,00	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Manokwari	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ketersediaan Dokumen RKPD	100%	3.724.000.000,00
5	1	2	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Manokwari	Persentase Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	2.788.624.372,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Manokwari	Persentase Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	2.205.000.000,00
5	1	2	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan	Manokwari	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD	1 Dokumen	-	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu	Manokwari	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD	1 Dokumen	250.000.000,00

					Isu Strategis Pembangunan Daerah		maka Rancangan Teknokratik)		Strategis Pembangunan Daerah		maka Rancangan Teknokratik)				
5	1	2	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Manokwari	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	-	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Manokwari	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	145.000.000,00	
5	1	2	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Manokwari	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	242.361.870,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Manokwari	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	350.000.000,00	
5	1	2	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Manokwari	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	187.899.458,00	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Manokwari	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	300.000.000,00	
5	1	2	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Manokwari	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	1.556.257.624,00	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Manokwari	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	1.050.000.000,00	
5	1	2	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	802.105.420,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	110.000.000,00	
5	1	2	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	686.232.292,00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	644.000.000,00	
5	1	2	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	125.000.000,00	
5	1	2	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Manokwari	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	25 Orang	185.838.960,00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Manokwari	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	25 Orang	151.000.000,00	

5	1	2	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Manokwari	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20 Orang	500.393.332,00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Manokwari	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20 Orang	168.000.000,00
5	1	2	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Manokwari	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Manokwari	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	200.000.000,00
5	1	2	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.606.031.984,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	Persentase Tercapainya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.606.031.984,00
5	1	2	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	136.827.628,00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	195.000.000,00
5	1	2	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Manokwari	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Manokwari	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	130.000.000,00
5	1	2	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.240.330.356,00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	300.000.000,00
5	1	2	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	1 Dokumen	228.874.000,00	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	1 Dokumen	250.000.000,00
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Manokwari	Persentase Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	4.339.112.889,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Manokwari	Persentase Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	5.510.000.000,00

					PEMBANGUNAN DAERAH									
5	1	3	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Manokwari	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat	100%	1.606.244.385,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Manokwari	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat	100%	1.980.000.000,00
5	1	3	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	152.579.608,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	350.000.000,00
5	1	3	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	137.255.768,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	130.000.000,00
5	1	3	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	124.992.118,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	350.000.000,00
5	1	3	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	152.668.917,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	300.000.000,00

5	1	3	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	145.597.750,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000,00
5	1	3	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	164.079.871,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	150.000.000,00
5	1	3	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	125.014.923,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	300.000.000,00
5	1	3	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	604.055.430,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	250.000.000,00
5	1	3	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Manokwari	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	1.665.780.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Manokwari	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	1.790.000.000,00
5	1	3	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	485.366.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	300.000.000,00

					(RPJPD, RPJMD dan RKPDP)									
5	1	3	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	106.260.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	120.000.000,00
5	1	3	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	248.032.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	300.000.000,00
5	1	3	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	179.580.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	250.000.000,00
5	1	3	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	213.776.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	120.000.000,00
5	1	3	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	99.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	100.000.000,00
5	1	3	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Manokwari	umlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	190.814.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Manokwari	umlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	250.000.000,00

					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Perangkat Daerah Bidang SDA				Perangkat Daerah Bidang SDA			
5	1	3	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	142.952.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	350.000.000,00
5	1	3	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Manokwari	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	1.067.088.504,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Manokwari	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	1.740.000.000,00
5	1	3	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	58.334.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	250.000.000,00
5	1	3	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	73.920.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	120.000.000,00
5	1	3	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	268.226.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	300.000.000,00
5	1	3	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	300.838.914,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	300.000.000,00

5	1	3	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	58.334.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000,00					
5	1	3	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	73.920.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	150.000.000,00					
5	1	3	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	64.560.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	300.000.000,00					
5	1	3	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	168.955.590,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	200.000.000,00					
JUMLAH									30.729.440.388,50	JUMLAH									30.966.045.200,50

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 BAPPEDA Provinsi Papua Barat merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan tahun ke 6 (Enam) atau transisi dalam dokumen Renstra BAPPEDA Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.

Penyusun Renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 yang sudah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Renja Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, BAPPEDA Provinsi Papua Barat dituntut dapat memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan yang ada dan melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggali dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Provinsi Papua Barat, melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang baik dan terkoordinasi yaitu dengan tetap memperhatikan program-program prioritas yang telah direncanakan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memaksimalkan pembangunan. Usulam program dan kegiatan Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3/T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BAPPEDA	<i>Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	
5	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA	<i>Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	
5	1	1	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	
5	1	1	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	
5	1	1	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	
5	1	1	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	
5	1	1	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Laporan	
5	1	1	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	
5	1	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	
5	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
5	1	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100 Orang/Bulan	
5	1	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	

5	1	1	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	
5	1	1	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	1 Dokumen	
5	1	1	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
5	1	1	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	
5	1	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
5	1	1	1.02	0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
5	1	1	1.02	0009	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
5	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	
5	1	1	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
5	1	1	1.05	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
5	1	1	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	

5	1	1	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	
5	1	1	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	
5	1	1	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	
5	1	1	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	
5	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
5	1	1	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5	1	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5	1	1	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	
5	1	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5	1	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
5	1	1	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	1 Dokumen	
5	1	1	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	
5	1	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	
5	1	1	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
5	1	1	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	

5	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
5	1	1	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	
5	1	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	
5	1	1	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
5	1	1	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
5	1	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	
5	1	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
5	1	1	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	
5	1	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
5	1	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	
5	1	1	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	

5	1	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	
5	1	1	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	
5	1	1	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
5	1	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
5	1	1	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	
5	1	2	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	
5	1	2	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	
5	1	2	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	
5	1	2	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	
5	1	2	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	
5	1	2	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Tercapainya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	

5	1	2	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	
5	1	2	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	160 Orang	
5	1	2	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Tercapainya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	
5	1	2	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	
5	1	2	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	
5	1	2	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	1 Dokumen	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	
5	1	3	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Tercapainya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	
5	1	3	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	
5	1	3	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	

5	1	3	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	
5	1	3	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	
5	1	3	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	
5	1	3	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	
5	1	3	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	
5	1	3	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	
5	1	3	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Tercapainya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	
5	1	3	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	
5	1	3	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	

5	1	3	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	
5	1	3	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	
5	1	3	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	
5	1	3	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	
5	1	3	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	
5	1	3	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	
5	1	3	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Tercapainya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	
5	1	3	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	
5	1	3	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	

5	1	3	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7 Laporan	
5	1	3	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	
5	1	3	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	
5	1	3	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	
5	1	3	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	
5	1	3	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengingat pertumbuhan daerah merupakan komponen penting pembangunan nasional, maka diperlukan telaahan untuk memastikan bahwa tujuan dan arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan tujuan dan arah kebijakan nasional. Arah kebijakan dan prioritas nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi aparatur daerah menjadi fokus kajian kebijakan nasional.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2025, telah ditetapkan tiga arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu:

1. Pembangunan SDM Berkualitas sebagai prioritas utama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan Infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Transformasi Ekonomi melalui Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan).

Dengan strategi pembangunan sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan :

1. SDM Berdaya Saing dan Produktif melalui transformasi sosial
2. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas melalui transformasi ekonomi dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan melalui Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang unggul, terpadu, sinergis, dan menyeluruh, perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus disinkronkan. Pemerintah daerah harus tetap fleksibel, berpikiran terbuka, dan tanggap terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah pusat guna menyikapi berbagai dinamika yang ada saat ini.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh konsekuensi berbagai kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat. Untuk memastikan pembangunan Papua Barat dapat berjalan secara terarah dan efisien, diperlukan rencana pembangunan tahunan yang sistematis yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana kerja (renja) perangkat daerah merupakan bagian dari RKPD yang merupakan perluasan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renja perangkat daerah juga mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan.

Bappeda Provinsi Papua Barat harus mengoordinasikan rencana pembangunan provinsi dengan rencana pembangunan nasional sebagai bagian dari tugas pokoknya sebagai penyelenggara fungsi pendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan. Berdasarkan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025, salah satu acuan dalam RKP Tahun 2025 adalah Prioritas Nasional (PN). Keterkaitan antara indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025, derajat keselarasan antara indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran PN RKP Tahun 2025, keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan PN RKP Tahun 2025, dan derajat keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian Prioritas Pembangunan.

Renja Bappeda tahun 2026 disusun sesuai dengan RKPD 2026, yang merupakan penjabaran atas RPD 2023-2026. Selain berpedoman pada RPD 2023-2026, RKPD 2026, Renja Bappeda 2026 juga berpedoman pada RKP Tahun 2025, dengan penyesuaian prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Provinsi Papua Barat. Adapun Tema RKP Tahun 2026: "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Penyesuaian prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dengan prioritas nasional disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Matriks Keterkaitan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional 2026

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS PAPUA BARAT 2026			
	Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)				√
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		√	√	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	√		√	
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	√			
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		√		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	√	√	√	
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan				√
Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				√

Sumber : RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026

Rumusan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 tersebut telah memperhatikan program prioritas nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2026 serta didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025 serta situasi dan kondisi eksternal (global).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dokumen Renja Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026 disusun dengan tujuan: (1) sebagai pedoman bagi aparaturnya Bappeda Provinsi Papua Barat tahun 2026 dalam melaksanakan program dan kegiatan; (2) memberikan arahan bagi aparaturnya Bappeda Provinsi Papua Barat dalam mencapai sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan (3) sebagai standar kinerja aparaturnya Bappeda Provinsi Papua Barat dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional tahun 2026.

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, dengan mengacu pada isu strategis di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2026 telah menetapkan Prioritas Pembangunan, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; 2) Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru; 3) Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi; 4) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik. Adapun tema pembangunan tahun 2025 sesuai dengan RKPD Provinsi Papua Barat yaitu **“Petumbuhan Ekonomi Meningkat dan Kualitas Hidup serta Kesejahteraan Masyarakat Terwujud Didukung Penguatan Daya Saing SDM”**.

Untuk menetapkan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur, indikator kinerja Bappeda Provinsi Papua Barat tahun 2026 disusun untuk memberikan gambaran awal tentang sejauh mana urusan pemerintahan di bidang perencanaan terlaksana dengan baik. Untuk menetapkan korelasi yang jelas antara kinerja pemerintah daerah dan aparaturnya daerah, RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023–2026 merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja pemerintah daerah. Tabel 3.2 di bawah ini menunjukkan kinerja Bappeda Provinsi Papua Barat tahun 2026.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	100	100
	Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus	Cakupan Realisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Kebijakan Otonomi Khusus	%	100	100
		Cakupan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100

Sumber : RENSTRA Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor –faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Pertimbangan strategis dan berbagai usulan yang disampaikan pada berbagai forum koordinasi menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Papua Barat pada tahun 2026. Antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026
2. Kebijakan anggaran untuk sumber pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penetapan program kegiatan BAPPEDA melalui perkiraan alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan pagu indikatif melalui proses penganggaran
3. Mendukung pencapaian tujuan sasaran Bappeda Provinsi Papua barat
4. Tingkat kemiskinan, ketimpangan dan tingkat pengangguran masih tinggi
Tingkat kemiskinan, ketimpangan dan penangguran Provinsi Papua Barat selama sepuluh tahun terakhir masih tinggi dan belum lebih baik dari rata-rata nasional.
5. Kualitas sumber daya manusia masih rendah
Status pengembangan manusia Provinsi Papua Barat sudah termasuk pada kategori sedang sebesar 66,66. Namun demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan nasional dan menempati peringkat terdua terendah.
6. Belum optimalnya ketersediaan konektivitas daerah, infrastruktur jalan, moda transportasi dan infrastruktur dasar
Kondisi jalan Provinsi Papua Barat dan jembatan yang belum mantap masih tinggi. Selain itu, pemerintah daerah tahun 2023 juga mengupayakan percepatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah.
7. Ancaman keamanan dan kenyamanan
Jumlah kejahatan Provinsi Papua Barat tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat risiko terkena kejahatan di Papua Barat menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia dengan crime rate sebesar 353 (per 100.000 penduduk) tahun 2022. Hal ini menjadi perhatian - 330 - bahwa penduduk Papua Barat lebih rawan menjadi korban kejahatan dibanding provinsi lainnya.
8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Rendahnya pendidikan politik pada kader partai politik Provinsi Papua Barat berkaitan dengan tata kelola pemerintah yang belum optimal.
9. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan hilirisasi komoditas unggulan belum efektif
Hilirisasi komoditas pertanian dan sektor industri belum mampu bersaing karena hasil olahan produksi pertanian dan barang mentah guna memberikan nilai tambah masih rendah.
10. Rendahnya akses pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
Akses terhadap layanan Kesehatan dan sanitasi, ketersediaan air bersih, serta penanggulangan penyakit endemik seperti malaria dan tuberkulosis masih terbatas. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti jumlah sekolah dan sumber daya pengajar yang kompeten dan tersertifikasi juga belum memadai.
11. Ketahanan bencana alam yang rendah dan pencemaran lingkungan yang meningkat.
Pada tahun 2022 resiko bencana Provinsi Papua Barat masih tinggi, dimana terdapat tiga bencana alam yang mendominasi Provinsi Papua Barat yaitu banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Selain itu, aktivitas perekonomian di sektor industri pertambangan dan batu bara yang masif memunculkan ancaman kerusakan lingkungan dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah Provinsi Papua Barat.

b. Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Bappeda Provinsi Papua Barat merencanakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp. **30.966.045.200,50** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026. Berikut dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Indikatif Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			30.966.045.200,50
5 01	PERENCANAAN			30.966.045.200,50
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			21.732.045.200,50
5 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			497.686.901,00
5 01 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	161.848.068,00
5 01 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	75.318.193,00
5 01 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	66.642.867,00
5 01 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	95.097.600,00
5 01 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	26.000.000,00
5 01 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	9.034.543,00
5 01 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	63.745.630,00
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.766.639.085,60
5 01 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	15.662.779.792,40
5 01 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	225.004.000,00
5 01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	161.276.363,30
5 01 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	211.578.929,90
5 01 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	185.000.000,00
5 01 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	45.000.000,00
5 01 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	250.000.000,00
5 01 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			706.119.213,00
5 01 01 1.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	53.000.000,00
5 01 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	45.500.000,00
5 01 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	104.520.000,00
5 01 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	127.599.213,00
5 01 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	225.000.000,00
5 01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	58.500.000,00
5 01 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	92.000.000,00
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.405.600.000,00
5 01 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	78.100.000,00
5 01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	89.500.000,00
5 01 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	89.500.000,00
5 01 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	78.000.000,00
5 01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	106.000.000,00
5 01 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	19.500.000,00
5 01 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	245.000.000,00
5 01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	700.000.000,00
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			461.500.000,00
5 01 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	318.500.000,00
5 01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	143.000.000,00
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.294.500.000,01
5 01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	19.500.000,00

5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	250.000.000,00
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	25.000.000,01
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	1.000.000.000,00
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600.000.000,89
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	195.000.000,00
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	30.000.000,00
5	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	50.000.000,89
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	325.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.724.000.000,00
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2.205.000.000,00
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	250.000.000,00
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	145.000.000,00
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	350.000.000,00
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	1.050.000.000,00
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	110.000.000,00
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			644.000.000,00
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	125.000.000,00
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	151.000.000,00
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	168.000.000,00
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	200.000.000,00

5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			875.000.000,00
5 01 02 1.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	195.000.000,00
5 01 02 1.03 0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	130.000.000,00
5 01 02 1.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5 01 02 1.03 0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	250.000.000,00
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.510.000.000,00
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.980.000.000,00
5 01 03 1.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	350.000.000,00
5 01 03 1.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	130.000.000,00
5 01 03 1.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	350.000.000,00
5 01 03 1.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5 01 03 1.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	150.000.000,00
5 01 03 1.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	150.000.000,00
5 01 03 1.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5 01 03 1.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	250.000.000,00
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			1.790.000.000,00
5 01 03 1.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5 01 03 1.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	120.000.000,00
5 01 03 1.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5 01 03 1.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	250.000.000,00

5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	120.000.000,00
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	100.000.000,00
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	250.000.000,00
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	350.000.000,00
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.740.000.000,00
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	250.000.000,00
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	120.000.000,00
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	120.000.000,00
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	150.000.000,00
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	300.000.000,00
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	P A D	200.000.000,00

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut (tabel 3.4).

Tabel 3.4 Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Perencanaan Pembagian Daerah Provinsi Papua Barat

K o d e					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	21.732.045.200,5			100%	23.905.249.720,55
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	497.686.901,00			100%	547.455.591,1
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Manokwari	1 Dokumen	161.848.068,00	DAU		3 Dokumen	178.032.874,8
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Manokwari	1 Dokumen	75.318.193,00	DAU		3 Dokumen	82.850.012,3
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Manokwari	1 Dokumen	66.642.867,00	DAU		3 Dokumen	73.307.153,7
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Manokwari	1 Dokumen	95.097.600,00	DAU		3 Dokumen	104.607.360,00
5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Manokwari	1 Dokumen	26.000.000,00	DAU		3 Dokumen	28.860.000,00
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Manokwari	1 Laporan	9.034.543,00	DAU		3 Laporan	9.937.997,3
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manokwari	1 Laporan	63.745.630,00	DAU		3 Laporan	70.120.193,00
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	16.766.639.085,60			100%	1.844.330.299,416
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Manokwari	100 Orang/ Bulan	15.662.779.792,40	DAU		300 Orang/ Bulan	1.722.905.777,164
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Manokwari	1 Dokumen	225.004.000,00	DAU		3 Dokumen	247.544.400,00
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Manokwari	1 Dokumen	161.276.363,30	DAU		3 Dokumen	17.740.399,963
5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Manokwari	1 Laporan	211.578.929,90	DAU		3 Laporan	23.273.682,289
5	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Manokwari	1 Dokumen	142.753.023,00	DAU		3 Dokumen	15.702.832,530
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Manokwari	1 Dokumen	45.000.000,00	DAU		3 Dokumen	49.500.000,00
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Manokwari	3 Laporan	185.000.000,00	DAU		9 Laporan	203.500.000,00
5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Manokwari	1 Dokumen	26.000.000,00	DAU		3 Dokumen	28.600.000,00
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	706.119.213,00			100%	776.731.134,300
5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Manokwari	10 Unit	53.000.000,00	DAU		30 Unit	58.300.000,00
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Manokwari	15 STELL	45.500.000,00	DAU		45 Stell	50.050.000,00
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Manokwari	2 Dokumen	104.520.000,00	DAU		6 Dokumen	114.972.000,00
5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Manokwari	1 Dokumen	127.599.213,00	DAU		3 Dokumen	140.359.134,30
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Manokwari	2 Dokumen	225.000.000,00	DAU		6 Dokumen	247.500.000,00
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Manokwari	15 Orang	58.500.000,00	DAU		45 Orang	64.350.000,00
5	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Manokwari	10 Orang	124.028.873,00	DAU		30 Orang	136.431.760,30
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Manokwari	10 Orang	92.000.000,00	DAU		30 Orang	101.200.000,00
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.405.600.000,00			100%	1.546.160.000,00
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Manokwari	1 Paket	78.100.000,00	DAU		3 Paket	85.910.000,00
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Manokwari	1 Paket	89.500.000,00	DAU		3 Paket	98.450.000,00
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Manokwari	1 Paket	89.500.000,00	DAU		3 Paket	98.450.000,00
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Manokwari	1 Paket	78.000.000,00	DAU		3 Paket	85.800.000,00

5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Manokwari	1 Paket	106.000.000,00	DAU		3 Paket	116.600.000,00
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Manokwari	1 Dokumen	19.500.000,00	DAU		3 Dokumen	21.450.000,00
5	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Manokwari	2 Laporan	245.000.000,00	DAU		3 Laporan	269.500.000,00
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Manokwari	20 Laporan	700.000.000,00	DAU		60 Laporan	770.000.000,00
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	461.500.000,00			100%	507.650.000,00
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Manokwari	1 Unit	318.500.000,00	DAU		3 Unti	350.350.000,00
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Manokwari	15 Unit	143.000.000,00	DAU		45 Unit	157.300.000,00
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.294.500.000,00			100%	1.423.950.000,00
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Manokwari	5 Laporan	19.500.000,00	DAU		15 Laporan	21.450.000,00
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Manokwari	1 Laporan	250.000.000,00	DAU		3 Laporan	275.000.000,00
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Manokwari	1 Laporan	25.000.000,01	DAU		3 Laporan	27.500.000,00
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Manokwari	12 Laporan	1.000.000.000,00	DAU		36 Laporan	1.100.000.000,00
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	600.000.000,89			100%	660.000.000,979
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Manokwari	15 Unit	195.000.000,00	DAU		45 Unit	214.500.000,00
5	01	01	1.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Manokwari	15 Unit	30.000.000,00	DAU		45 Unit	33.000.000,00
5	01	01	1.08	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Manokwari	1 Unit	50.000.000,89	DAU		3 Unit	55.000.000,979
5	01	01	1.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Manokwari	1 Unit	325.000.000,00	DAU		3 Unit	357.500.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ketersediaan Dokumen RKPD		100%	3.724.000.000,00			100%	4.096.400.000,00
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100%	2.205.000.000,00			100%	2.425.500.000,00
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Manokwari	2 Dokumen	250.000.000,00	DAU		4 Dokumen	275.000.000,00
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	1 Dokumen	145.000.000,00	DAU		2 Dokumen	159.500.000,00
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Manokwari	1 Berita Acara	350.000.000,00	DAU		2 Berita Acara	385.000.000,00
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Manokwari	1 Berita Acara	300.000.000,00	DAU		2 Berita Acara	330.000.000,00
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Manokwari	2 Berita Acara	1.050.000.000,00	DAU		4 Berita Acara	1.155.000.000,00
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Manokwari	1 Dokumen	110.000.000,00	DAU		2 Dokumen	121.000.000,00
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	644.000.000,00			100%	710.400.000,00
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Manokwari	1 Dokumen	125.000.000,00	DAU		2 Dokumen	137.500.000,00
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Manokwari	25 Orang	151.000.000,00	DAU		50 Orang	166.100.000,00
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Manokwari	20 Orang	168.000.000,00	DAU		40 Orang	184.800.000,00
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Manokwari	12 Buku	200.000.000,00	DAU		24 Buku	220.000.000,00
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	875.000.000,00			100%	962.500.000,00
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Manokwari	2 Laporan	195.000.000,00	DAU		4 Laporan	214.500.000,00
5	01	02	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Manokwari	1 Kerja Sama	130.000.000,00	DAU		2 Kerja Sama	143.000.000,00
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Manokwari	1 Laporan	300.000.000,00	DAU		2 Laporan	330.000.000,00
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Manokwari	1 Dokumen	250.000.000,00	DAU		2 Dokumen	275.000.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100%	5.510.000.000,00			100%	6.061.000.000,00

5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat		100%	1.980.000.000,00		100%	2.178.000.000,00
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	1 Dokumen	350.000.000,00	DAU	1 Dokumen	385.000.000,00
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Manokwari	1 Laporan	130.000.000,00	DAU	1 Laporan	143.000.000,00
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Manokwari	1 Laporan	350.000.000,00	DAU	1 Laporan	385.000.000,00
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Manokwari	1 Laporan	300.000.000,00	DAU	1 Laporan	330.000.000,00
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	1 Dokumen	150.000.000,00	DAU	1 Dokumen	165.000.000,00
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	1 Laporan	150.000.000,00	DAU	1 Laporan	165.000.000,00
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	1 Laporan	300.000.000,00	DAU	1 Laporan	330.000.000,00
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Manokwari	1 Laporan	250.000.000,00	DAU	1 Laporan	275.000.000,00
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	1.790.000.000,00		100%	1.969.000.000,00
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	1 Dokumen	300.000.000,00	DAU	1 Dokumen	330.000.000,00
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	1 Laporan	120.000.000,00	DAU	1 Laporan	132.000.000,00
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Manokwari	1 Laporan	300.000.000,00	DAU	1 Laporan	330.000.000,00
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Manokwari	1 Laporan	250.000.000,00	DAU	1 Laporan	275.000.000,00
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	1 Dokumen	120.000.000,00	DAU	1 Dokumen	132.000.000,00
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Manokwari	1 Laporan	100.000.000,00	DAU	1 Laporan	110.000.000,00
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Manokwari	1 Laporan	250.000.000,00	DAU	1 Laporan	275.000.000,00
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Manokwari	1 Laporan	350.000.000,00	DAU	1 Laporan	385.000.000,00
5	01	04	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	1.740.000.000,00		100%	1.914.000.000,00
5	01	04	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	1 Dokumen	250.000.000,00	DAU	1 Dokumen	275.000.000,00
5	01	04	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Manokwari	1 Laporan	120.000.000,00	DAU	1 Laporan	132.000.000,00
5	01	04	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Manokwari	1 Laporan	300.000.000,00	DAU	1 Laporan	330.000.000,00
5	01	04	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Manokwari	1 Laporan	300.000.000,00	DAU	1 Laporan	330.000.000,00
5	01	04	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Manokwari	1 Dokumen	120.000.000,00	DAU	1 Dokumen	132.000.000,00

5	01	04	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Manokwari	1 Laporan	150.000.000,00	DAU		1 Laporan	165.000.000,00
5	01	04	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Manokwari	1 Laporan	300.000.000,00	DAU		1 Laporan	330.000.000,00
5	01	04	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Manokwari	1 Laporan	200.000.000,00	DAU		1 Laporan	220.000.000,00
JUMLAH									30.966.045.200,50				34.062.649.720,55

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Pembangunan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025. Artinya, aturan tersebut sudah harus dipatuhi pada saat menyusun RKPDP dan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Bappeda Provinsi Papua Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja strategis perangkat daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Program dan kegiatan utama yang mendukung pencapaian RPD Provinsi Papua barat tahun 2023-2026 tertuang dalam Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Provinsi Papua Barat tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				30.966.045.200,50							
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				30.966.045.200,50							
5	01	PERENCANAAN				30.966.045.200,50						
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	21.732.045.200,50					
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	-	497.686.901,00	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	161.848.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	75.318.193,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	66.642.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	95.097.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	1 Laporan	9.034.543,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	161.276.363,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	211.578.929,90	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2 Dokumen	104.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	127.599.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	15 Orang	58.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	10 Orang	92.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	1.405.600.000,00			PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	78.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	89.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	89.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		1 Paket	106.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	19.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2 Laporan	245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	-	461.500.000,00			PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	1 Unit	318.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	15 Unit	143.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	1.294.500.000,01		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5 Laporan	19.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan		1 Laporan	25.000.000,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

					Perlengkapan Kantor yang Disediakan					n, Semua Kel/Desa				
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	600.000.000,89		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	15 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	1 Unit	50.000.000,89	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ketersediaan Dokumen RKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 0Persen AdaAda 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen AdaAda/Tidak Ada 100Persen ada ada/tidak ada 100.00 Persen	100 Persen ada ada/tidak ada	3.724.000.000,00			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100 % 100 % undefined undefined	2.205.000.000,00		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah							

					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4 Berita Acara	1 Berita Acara	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi									
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	4 Berita Acara	2 Berita Acara	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi									

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100%	-	644.000.000,00		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah								
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	120 Orang	25 Orang	151.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	52 Orang	20 Orang	168.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat	100 Persen	100 Persen	5.510.000.000,00				
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	100%	-	1.980.000.000,00		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								

					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan							
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							

					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	100%	-	1.790.000.000,00		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	4 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
J U M L A H								30.966.045.200,50						

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026 (selanjutnya disebut Renja). Renja 2026 memuat rencana, kegiatan, sasaran, dan tujuan, selain sasaran kinerja. Untuk mendukung tercapainya arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan tahunan 2026, maka disusunlah Renja Bappeda Provinsi Papua Barat Tahun 2026 sebagai pedoman kerja.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tahun 2026 ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan RKPD 2025, sehingga program dan kegiatan dalam Renja 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Agar dapat memperoleh capaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program/kegiatan di BAPPEDA Provinsi Papua Barat, baik dalam hal kerangka regulasi, keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, yaitu dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas dan transparan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Papua Barat.

Renja BAPPEDA Provinsi Papua Barat Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tata cara penyusunannya dimulai sejak tanggal penetapan sampai dengan pelaksanaannya dengan memperhatikan dan memanfaatkan konsep koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Manokwari,

2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat

DEASSY D. TETELEPTA, ST

Pembina (IV/a)

NIP. 197312092003122005